

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Berikut merupakan hasil pada penelitian terdahulu yang memiliki relevansi penelitian dengan metode kualitatif pada BUMDes diantaranya sebagai berikut:

1. Pada penelitian ini dilakukan oleh Apriliana tahun 2016, seorang mahasiswa di Universitas Lampung yang membuat penelitian berjudul “Evaluasi Program Nasional Pemberdayaan Perempuan (PNPM) Mandiri Simpan Pinjam Perempuan (SPP) untuk usaha Meningkatkan Kesejahteraan dalam Perekonomian Masyarakat (Studi Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu)”. Didalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang sama dengan penelitian ini.

Pada penelitian tersebut memberikan hasil yang telah menunjukkan program simpan pinjam (SPP) dapat memberikan bantuan terhadap rumah tangga miskin yang digunakan sebagai modal usaha untuk meningkatkan produktifitas yang bertujuan mengembangkan bentuk usaha yang ada, Dengan pemberian akses permodalan diharapkan berdampak baik pada masyarakat sebagai modal usaha, Diharapkan mampu menambah kesempatan kerja untuk peluang yang lebih maju, Menciptakan dan mengembangkan produktifitas didalam usaha pada kelompok perempuan, Menciptakan kualitas yang tinggi pada sumber daya manusia untuk masyarakat sejahtera, Mewujudkan pertumbuhan perekonomian masyarakat, Menjunjung tinggi rasa persaudaraan antar masyarakat satu dengan yang lain (Apriliana. 2016).

Didalam metode penelitian tersebut memiliki kesamaan terhadap penelitian yang akan dilakukan yaitu pada tahapan evaluasi proses program. Dan memiliki perbedaan pada penelitian terhadap program diteliti serta teori yang akan digunakan ada penelitian ini.

2. Pada penelitian ini dilakukan oleh Agung Tri Prabowo tahun 2018, seorang peneliti dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan penelitian berjudul “Evaluasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Kasus Studi BUMDes Desa Pojong Kecamatan Pojong Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2017)”. Didalam penelitian tersebut menerapkan metode kualitatif yang sama dengan penelitian ini.

Pada penelitian tersebut menyebutkan hasil bahwa tahapan pengelolaan proses BUMDes Hanyukupi melakukan suatu bentuk tiga tahapan evaluasi yaitu diantaranya tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan, serta tahapan pasca pelaksanaan. Yang mana pada masing-masing tahapan memberikan hasil evaluasi yang sudah ditargetkan dari pihak pengelola BUMDes Hanyukupi Desa Pojong. Pengelolaan ini sudah disesuaikan yang dimulai dari perencanaan sampai dengan pasca pelaksanaan yang sudah dicapainya tujuan utama yaitu dapat menciptakan perekonomian yang berkeadilan dan berkesejahteraan bagi masyarakat Desa Pojong (Prabowo,A.Tri.2018).

Didalam penelitian tersebut memiliki kesamaan pada penelitian yang akan dikerjakan oleh penulis pada fokus penelitian evaluasi pengelolaan BUMDes. Akan tetapi memiliki perbedaan pada letak teori yang digunakan.

3. Pada penelitian ini dilakukan oleh Dian Lestari, Mappamiring, dan Abdi pada tahun 2018, mereka mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar. Penelitian yang berjudul “Manajemen Strategik didalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berlokasi pada Desa Sugiwaras Kecamatan Monomulyu Kabupaten Poliwali Mandar”. Didalam penelitian tersebut menerapkan metode penelitian kualitatif yang sama dengan penelitian ini.

Pada penelitian tersebut memberikan hasil bahwa proses strategi yang direncanakan pada BUMDes dikatakan sudah sesuai karena sudah dilakukan secara matang dan dapat memberikan pertimbangan untuk macam faktor baik didalam maupun diluar BUMDes.

Pelaksanaan proses strategi yang diterapkam BUMDes bisa menjadi kurang sesuai apabila belum representatif. Dan jika sudah melibatkan banyak faktor pemerintahan luar juga internal pemerintahan pada pihak yang bersangkutan. Dan juga memiliki beberapa kendala untuk proses pelaksanaannya pada segi implementor utama melibatkan pengurus dan pelaku usaha BUMDes Sugihwaras Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar (Lestari, Diyan. Dkk. 2018).

Didalam penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yang dilakukan adalah sama meneliti pada bagian pengelolaan BUMDes, akan tetapi juga memiliki perbedaan pada letak fokus penelitian yang dimana dalam penelitian ini adalah manajemen strategik pada pengembangan BUMDes Desa Sugiharas Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar.

4. Pada penelitian ini dilakukan oleh Subaidah ditahun 2019, merupakan mahasiswa Pasca Sarjana di Universitas Tadulako. Pada penelitian tersebut berjudul “Evaluasi Pengelolaan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) berlokasi Kabupaten Sigi (Studi pada Gapoktan Sigampa Desa Kaleke Kecamatan Dolo Barat)”. Didalam penelitian tersebut menerapkan metode penelitian kualitatif yang sama dengan penelitian ini.

Pada penelitian tersebut menyebutkan hasil bahwa didalam pengelolaan kegiatan yang dijalankan untuk program setiap PUAP pada kelompok tani di Gapoktan Sigampa Desa Kaleke Kecamatan Dolo Barat Kabupaten Sigi. Didalam sisi masukan memberikan proses tujuan mekanisme untuk penyaluran sejumlah dana yang sudah sesuai dengan apa yang diharapkan pada hasil yang ada didalam Pedoman Umum Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PEDUM PUAP) (Subaidah. 2019).

Didalam penelitian tersebut memiliki persamaan dengan apa yang akan penelitian ini lakukan adalah pada fokus penelitian yang mengarah kebagian evaluasi pengelolaan program.

Akantetapi juga memiliki perbedaan pada bagian teori yang akan digunakan untuk menganalisis.

5. Pada penelitian ini dilakukan oleh Ulul Hidayah, Sri Mulatsih, Yeti List Purnamadewir di tahun 2019, kelompok mahasiswa pada Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor. Dalam penelitian tersebut mengangkat judul “Evaluasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Studi Kasus pada BUMDes Harapan Jaya Desa Pagelaran Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor “. Didalam penelitian ini menerapkan metode kualitatif yang sama dengan peneliti lakukan didalam penelitian ini.

Pada penelitian tersebut menyebutkan hasil bahwa proses pada setiap pembentukan pengembangan BUMDes Harapan Jaya di tahun 2015-2016 sedang mengalami kebangkrutan dikarenakan adanya kurang partisipasi untuk berkomitmen pada pihak pengurus, Dan terjadi pada saat di tahun 2017 perencanaan untuk pengembangan BUMDes Harapan Jaya merencanakan untuk pengembangan 6 unit usaha akantetapi hingga akhir tahun 2018 hanya dapat merealisasikan 4 unit usaha saja, Dari empat unit usaha yang berjalan belum dapat menyeimbangkan pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi tingkat pengangguran pada Desa Pagelangan, Dari seluruh penyerapan tenaga kerja hanya mampu mengambil 20 orang. Sedangkan dari jumlah pendapatan omset untuk BUMDes sudah terlihat bagus meskipun masih tergolong kecil sehingga belum mampu memberikan kontribusi untuk pendapatan desa (Hidayah, Ulul. Dkk. 2019).

Didalam penelitian tersebut juga memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu pada fokus penelitian evaluasi pengelolaan BUMDes. Alantetapi juga memiliki perbedaan pada studi kasus yang digunakan pada penelitian tersebut.

2.2 Tinjauan Teori/Konsep

1. Konsep BUMDes

Pada Peraturan Menteri Desa nomor 4 ditahun 2015 yang memberikan kejelasan bahwa bentuk pendirian BUMDes pada pasal 2 menjelaskan bahwa Pendirian BUMDes yang untuk diarahkan dengan maksud sebagai bentuk usaha dari menampung seluruh kegiatan dalam perekonomian atau pelayanan umum yang dapat dikelola oleh pihak desa. Pada pendirian BUMDes didalam pasal 3 menjelaskan beberapa tujuan yang mengarah pada :

- a. Peningkatan desa dalam perekonomian;
- b. Pengoptimalan tatakelola asset untuk kesejahteraan desa;
- c. Peningkatan tatakelola usaha dalam potensi perekonomian desa;
- d. Pengembangan kolaborasi usaha antar desa dengan dukungan pihak ketiga;
- e. Penciptaan layanan baru untuk warga agar mendukung kebutuhan pasar;
- f. Pembukaan sebuah lapangan peerjaan baru;
- g. Peningkatan perbaikan pelayanan untuk kesejahteraan masyarakat;
- h. Peningkatan pendapatan asli desa serta pendaatan pada masyarakat desa.

Selain itu didalam Pasal 4 pada Peraturan Mentri Desa Nomor 4 di Tahun 2015 menjelaskan tentang pemaparan bahwa:

1. Desa dapat berusaha dalam membentuk BUMDes dengan pendirian yang berdasarkan tentang peraturan desa untuk pengembangan BUMDes.
2. Desa dapat mendirikan BUMDes sesuai dengan apa yang ditujukan pada ayat (1) serta mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Dengan upaya aktif dari pemerintah hingga masyarakat desa;
 - b. Dengan peluang potensi pada usaha perekonomian desa;

- c. Dengan pengelolaan sumberdaya alam pada desa;
- d. Dengan pengembangan sumberdaya manusia dapat mengelola desa;
- e. Dengan penyaluran dana dari pemerintah untuk permodalan pembiayaan yang akan dikelola pada usaha BUMDes.

Pada tahapan untuk pengelolaan pada pelaksanaan proses diatur juga operasional didalam Pasal 12 yang menjelaskan bahwa:

- 1) Pelaksanaan sebagaimana yang dimaksud untuk operasional yang ada didalam Pasal 10 mempunyai bagian mengurus dan mengelola tugas BUMDes sesuai dengan anggaran;
- 2) Pelaksanaan pada tahapan untuk proses pengelolaan operasional yang ada pada tahapan sudah dijelaskan pada ayat (1) dengan maksud memiliki kewajiban;
- 3) Pelaksanaan untuk proses dalam menggali pemanfaatan perekonomian didalam potensi desa agar memberikan pendapatan asli desa;
- 4) Pelaksanaan dalam proses pembangunan BUMDes untuk dijadikan sebuah lembaga pelayanan kebutuhan perekonomian pada desa; dan
- 5) Pelaksanaan untuk menjalin hubungan kerjasama antar desa dengan lembaga perekonomian desa dengan baik.

Pada tahap pengelolaan dan pembentukan BUMDes diharapkan dapat sesuai dengan tujuan sebagaimana apa yang dimaksudkan dari pasal 3 Peraturan Menteri Desa pada tahun 2015. Dimana tujuan pada BUMDes dapat untuk:

1. Dikelola untuk dapat meningkatkan perekonomian desa;
2. Pengoptimalan asset desa untuk dapat dikembangkan dan memiliki manfaat;
3. Peningkatan usaha masyarakat untuk kelola potensi usaha desa;
4. Pengembangan rencana pada kerjasama antar pihak desa;
5. Penciptaan peluang cipta usaha agar mendukung jaringan pasar di desa;

6. Pembukaan lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat desa;
7. Peningkatan kesejahteraan lapisan masyarakat untuk pertumbuhan desa;
8. Pemasukan pada peningkatan pendapatan asli desa.

2. Konsep Pembangunan Masyarakat

Pada tahapan ini konsep pembangunan masyarakat (*community development*), sesuai pendapat oleh Dirjen Bangdes yaitu merupakan hakekat suatu bentuk yang dinamis dan menjadi bentuk kelanjutan pada masyarakat untuk terciptanya keinginan dan harapan yang penuh dengan strategi untuk terhindar dari berbagai macam kecil kemungkinan yang dapat menyudutkan masyarakat desa untung menanggung dari akses pembangunan regional maupun nasional. Sedangkan jika menurut Soelaiman dan Suyatno (2003), hal dalam pengertian tersebut mengandung makna, begitu pentingnya sebuah bentuk inisiatif yang mampu menggerakkan partisipasi aktif dalam masyarakat untuk model dalam pembangunan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan ini tidak hanya berpusat untuk birokrasi melainkan juga berpusat untuk masyarakat dan komunitas dengan pemberian kekuasaan masyarakat lokal dan upaya partisipasi akan menjadi sebuah perkembangan didalam pembangunan masyarakat.

Pada bentuk proses yang ada didalam masyarakat mengandung esensi bahwa pada hakekatnya bukan hanya untuk membantu dan mengatasi beberapa kesulitan yang dihadapi, melainkan juga lebih dari itu dalam pembangunan di masyarakat merupakan suatu bentuk usaha dalam pengembangan untuk membentuk kemandirian agar dapat menemukan solusi pada masalahna sendiri. Manusia juga merupakan bagian unsur pokok yang berdampak pada proses pembangunan dan dapat bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dikarenakan bentuk idealnya pembangunan masyarakat juga membutuhkan bentuk partisipasi

aktif dan inisiatif dari masyarakat maka pembangunan akan berhasil dan memberikan dampak pergerakan masyarakat yang ada.

Dengan demikian, bentuk bagian dari indikator keberhasilan untuk pembangunan masyarakat diukur dengan usaha partisipasi aktif dari masyarakat yang ada didalamnya. Usaha masyarakat untuk meningkatkan titik sentral dalam proses pembangunan masyarakat dan proses didalamnya memberikan asumsi untuk dapat melihat bentuk suatu saran unit kerja yang salah satunya ialah usaha pelayanan koperasi simpan pinjam. Kegiatan unit usaha ini didasarkan pada potensi lokal yang memberikan sumber dari segala aspek yang dapat dikembangkan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat dikelola pada pembangunan perekonomian desa.

Kesempatan dalam sebuah kepercayaan yang dilakukan dalam bentuk peluang usaha agar dapat memberikan kesempatan sama pada kebebasan untuk memilih dan kekuasaan pengambilan keputusan (*empowerment*). Dimana hal ini dapat menciptakan usaha aktif didalam lapisan masyarakat agar dapat terus menerus bergerak sebagai tujuan utama pembangunan masyarakat secara mandiri. Dengan demikian dapat mewujudkan kemandirian dan mengurangi ketergantungan.

Hal ini bertujuan untuk menginventarisasi suatu hal yang berasal dari luar dengan tujuan stimulant untuk masyarakat agar lebih berdaya untuk mewujudkan keaktifan sehingga jangan sampai menyebabkan ketergantungan dan menurunkan kreatifitas mereka. Sumber dukungan dari pihak luar hanya sebagai fasilitator untuk tidak digunakan sebagai sumber utama saja akan tetapi juga dapat menerima sumber ajaran dari masyarakat.

3. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Pada konsep yang ada untuk pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) yang diartikan sebagai bentuk pemberdayaan kepada lapisan masyarakat yang akan dilakukan kepada pihak pemerintah yang akan memberikan fasilitas kepada masyarakat lokal dalam merencanakan dan memutuskan serta mengelola seluruh sumberdaya alam yang ada untuk dimiliki dalam mewujudkan kemampuan dan kemandirian secara perputaran perekonomian dalam jangka panjang. Diharapkan pemberdayaan masyarakat memiliki hakekat erat dengan apa yang sesuai oleh syarat-syarat yang berkelanjutan dalam membangun kemandirian masyarakat dalam segi ekonomi dan sosial yang ada di lapisan masyarakat.

Didalam Suyatno (2003), menjelaskan beberapa bentuk konsep pemberdayaan yang memberikan hakekat dalam beberapa aspek berikut ini:

- a. Pengambilan keputusan dalam inisiatif agar memberikan pemenuhan kebutuhan masyarakat tingkat lokal.
- b. Pemberdayaan pada fokus utama agar dapat memperkuat setiap elemen kemampuan masyarakat untuk dapat mengawasi dan memberikan arahan untuk asset-asset yang dimiliki untuk menggali potensi setiap daerah.
- c. Pengembangan toleransi untuk setiap perbedaan dan mengakui betapa pentingnya setiap pilihan yang memiliki nilai pada setiap individu.
- d. Pembangunan dalam rangka untuk mencapai tujuan didalam pengembangan sosial melalui proses belajar (*social learning*) yang mana setiap individu memberikan interaksi dan memberikan saran kritis setiap individual. Didalam budaya untuk sebuah kelembagaan ditandai oleh unit lokal yang dapat mengembangkan pengelolaannya masing-masing.

e. Pemerataan dalam jaringan koalisi pada setiap unit lokal yang bersangkutan agar dapat memberikan manfaat yang mencakup setiap kelompok di daerah yang bersangkutan. Dan menjadikan basis untuk pengelolaan lokal yang digunakan untuk mengawasi pengawasan lokal yang memiliki dasaran luas diberbagai sumber untuk mengelola sumberdaya yang ada.

Pada hakikatnya dari beberapa batasan yang ada pada pengertian diatas terdapat beberapa unsur yang memberikan pengertian untuk pembangunan masyarakat dengan mengandalkan pada setiap komunitas yang ada untuk kesatuan. Dengan memberikan titik utama pada prakarsa sumberdaya setempat untuk membentuk sinergi internal dan eksternal agar dapat terintegrasi oleh masyarakat lokal dan nasional. Didalam itu untuk pengembangan diarahkan sebagai bentuk peningkatan kapasitas masyarakat untuk pembangunan dan pengelolaan. Berkaitan dengan setiap individu agar dapat meningkatkan kemampuan agar berperan dalam seluruh proses pengalaman sosial yang ada pada masyarakat. Dengan demikian sudah memberikan seluruh kecakupan yang ada untuk pemahaman terhadap realitas di sekeliling untuk tahapan perealisasiian tujuan terhadap gagasan tujuan target proyek yang akan dicapai.

Pada pemberdayaan masyarakat yang memberikan suatu bentuk proses perencanaan yang memudahkan pembangunan agar target disetiap pengembangan membantu kemampuan pada masyarakat lokal. Untuk itu setiap elemen lapisan masyarakat perlu diarahkan dalam keterlibatan tahapan untuk proses perencanaan evaluasi program yang dilakukan. Maka dengan hal tersebut penempatan masyarakat sebagai subjek dapat dan mampu memberikan dampak pemberdayaan yang baik. Pemberdayaan yang berkesinambungan memiliki peran penting dan sebagai bagian bentuk proses yang terarah. Dengan mengutamakan kreatifitas

masyarakat dan partisipasi aktif agar mampu menjadi alternatif yang merupakan bagian dari pemberdayaan. Pembangunan didalam pemberdayaan ini merupakan inti dari model alternatif untuk pembangunan yang mengutamakan pertumbuhan.

4. Kosep Evaluasi Program

a. Pengertian Evaluasi

Pada pengertian didalam kamus besar bahasa indonesia, evaluasi diartikan sebagai bagian bentuk dari proses yang dapat menemukan nilai untuk layanan informasi atau produk yang dibutuhkan oleh pihak konsumen atau pengguna yang akan dilalui oleh tahapan evaluasi. Dan juga merupakan bentuk proses penelitian positif atau negatif yang merupakan gabungan diantaranya untuk digunakan sebagai bahan evaluasi. (Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia: 2016).

Pada hakekatnya evaluasi merupakan suatu bentuk untuk memeriksa terhadap pembentukan pada pelaksanaan suatu program yang dilakukan untuk digunakan sebagai mengendalikan program jangka panjang untuk kedepannya. Agar evaluasi dapat menjadikan lebih baik maka harus dilakukan terhadap membenaran didalam kesalahan-kesalahan yang dilakukan untuk tujuan keberhasilan program. Dengan demikian disetiap evaluasi yang ada kita dapat memberikan masukan agar sesuai dengan visi dan misi dari evaluasi itu sendiri untuk membentuk kesempurnaan program dimasa yang akan datang.

Didalam pendapat Yusuf (2000) evaluasi merupakan bagian dari usaha untuk mengukur dari sumber nilai objektif yang memiliki pencapaian hasil yang direncanakan sebelumnya untuk dimasukkan sebagai umpan balik terhadap perencanaan dimasa depan. Oleh karena itu Yusuf menitik beratkan dari kajian evaluasi bagian manajemen untuk

evaluasi yang berfungsi sebagai unsur manajemen untuk perbaikan fungsi sosial yang berkaitan dengan manajemen perencanaan.

Didalam pendapat Jones (dalam Suharto: 2005) menyatakan bentuk evaluasi merupakan rancangan untuk menimbang manfaat program yang memberikan spesifikasi teknik pengukuran, kriteria, metode analisis dan bagian struktur yang direkomendasikan. Boyle (dalam Suharto, 2005) evaluasi yang dilakukan untuk dapat memberikan pengetahuan pasti pada pencapaian hasil dari kemajuan untuk kendala yang dijumpai pada tata pelaksanaan strategi yang terencana agar dapat memberikan nilai untuk dipelajari. Dalam hal tersebut, evaluasi dapat mengidentivikasi terhadap apa yang sebenarnya akan terjadi pada proses penerapan sebuah program.

b. Evaluasi Program

Pada pengertian yang disampaikan Tyler oleh Arikunto dan CepiSafruddin Abdul Jabar (2009), evaluasi program merupakan bentuk proses yang memberikan pengetahuan untuk dapat mengetahui tujuan terealisasinya pendidikan. Selain itu ada pengertian menurut Cronbach dan Stufflebeam yang disampaikan oleh Suharsimi Arikuntodan Cepi Safruddin Abdul Jabar (2009), evaluasi program merupakan bentuk upaya sebagai penyediaan sebuah layanan informasi agar dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan kepada pihak pengelola.

Jika dilihat pada beberapa pendapat diatas maka dapat kita simpulkan untuk evaluasi program merupakan bentuk proses dari pengumpulan data dan informasi ilmiah yang dapat digunakan sebagai bahan arahan untuk memberikan hasil. Dan ini akan sangat berguna bagi pihak pengelola yang nantinya digunakan untuk menentukan kebijakan alternatif untuk menentukan arah dan tujuan bagi pihak pengelola.

c. Tujuan dan Fungsi Evaluasi Program

Pada pengertian yang disampaikan Endang Mulyatiningsih (2011), menyatakan bahwa bentuk dari evaluasi program dilakukan bertujuan untuk:

- 1) Memberikan subangan pada setiap pencapaian untuk program yang akan dilakukan untuk tujuan organisasi. Agar dapat memeberikan hasil yang sesuai dengan evaluasi dan penting untuk dikembangkan program yang sama untuk tempat lain.
- 2) Memberian tindakan keputusan untuk keberlanjutan pada sebuah program yang perlu untuk diteruskan atau diperbaiki.

Jika diamati pada tujuan dapat kita simpulkan bahwa, didalam hal yang ingin kita mengetahui bentuk suatu kondisi maka tahap proses evaluasi untuk program dapat dikatakan sebagai bentuk penelitian evaluatif. Yang dikarenakan pada evaluasi program para pelaku evaluasi dapat memberikan tukar fikir yang sesuai untuk dapat menentukan pelaksanaan langkah bagaimana penelitian akan dilakukan.

Sedangkan didalam pendapat Wahab (2002) evaluasi memiliki tiga fungsi yang digunakan sebagai arahan utama dalam analisis keputusan yaitu:

- 1) Evaluasi dapat menghasilkan suatu layanan informasi yang salah yang dapat dipercaya untuk menentukan kebijakan yang telah dicapai untuk melakukan tindakan publik. Dengan demikian evaluasi dapat digunakan untuk mengungkapkan sebarapa jauh tujuan dan target untuk pencapaian.
- 2) Evaluasi juga dapat memberikan sumbangan klarifikasi terhadap bentuk kritik dan saran yang menjadi dasar atas nilai-nilai yang digunakan untuk menentukan tujuan dan target.

Pada tahap ini dapat memperjelas bagian mana yang akan digunakan untuk mendefinisikan dalam operasi target dan tujuan dari evaluasi tersebut.

- 3) Evaluasi yang akan memberikan sumbangan pada system dalam metode untuk analisis kebijakan lainnya, yang merupakan rangkaian perumusan tahapan untuk penyesuaian rekomendasi. Didalam informasi yang kurang memadai maka kinerja dapat mengarahkan perumusan ulang kebijakan.

Sesuai apa yang disebutkan untuk fungsi tahapan evaluasi diatas, dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa bentuk dari nilai evaluasi merupakan bagian dari proses untuk dioperasionalkan oleh seseorang untuk dapat memberikan keberhasilan pada tujuan utama sebuah program. Pada bentuk keberhasilan sebuah program dapat kita jumpai dikemudian hari yang akan meberikan dampak positif pada tujuan dan arahan yang akan dicapai. Didalam pogram tersebut juga dapat memberikan masukan tahapan evaluasi yang akan dilakukan oleh pihak pengelola.

d. Model Evaluasi Program

Pada setiap bentuk model evaluasi antara satu dengan yang lain dapat memiliki tampak yang sangat bervariasi akan tetapi bertujuan sama yaitu sesuai dengan apa yang dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan sebagai objek untuk dievaluasi. Berikutnya informasi yang sudah dikumpulkan akan diberikan kepada pihak pengambilan keputusan untuk dapat dilakukan tindakan langkah lanjutan terhadap apa yang perlu dievaluasi oleh pengelola tentang tindak lanjut dari program evaluasi.

Didalam pendapat oleh Kaufman dan Thomas yang disampaikan oleh Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin Abdul Jabar (2009), memberikan delapan macam model evaluasi sebagai berikut:

- a) Discrepancy Model, yang telah dikembangkan oleh Provus.
- b) Responsive Evaluation Model, yang dikembangkan oleh Stake.
- c) CIPP Evaluation Model, yang dikembangkan oleh Stufflebeam.
- d) Goal Free Evaluation Model, yang dikembangkan oleh Scriven.
- e) Countenance Evaluation Model, yang dikembangkan oleh Stake.
- f) Goal Oriented Evaluation Model, yang dikembangkan oleh Tyler.
- g) CSE-UCLA Evaluation Model, yang dikembangkan oleh Scriven.
- h) Formatif Summatif Evaluation Model, yang dikembangkan oleh Michael.

e. Evaluasi Program CIPP

Pada bentuk model didalam penelitian ini akan menggunakan model penelitian yang dikembangkan oleh Stufflebeam merupakan pengenalan dengan sebutan CIPP Evaluation Model. Evaluasi ini merupakan singkatan dari CIPP (*Context, Input, Process, Product*). Didalam buku penelitian Riset Penelitian yang dikembangkan oleh Endang Mulyatiningsih (2011), yang memberikan kejelasan bahwa didalam bentuk evaluasi CIPP sering dikenal dengan sebutan evaluasi formatif yang bertujuan untuk mengambil suatu keputusan dari perbaikan sebuah program. Didalam komponen evaluasi CIPP dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Context, pada bagian ini evaluasi konteks merupakan orientasi utama dari mengidentifikasi seperluna pada bagian latar belakang untuk dapat memberikan perubahan atau dengan munculnya bentuk program dari beberapa keterlibatan didalam suatu pengambilan keputusan.
- 2) Input, pada bagian ini merupakan evaluasi input yang digunakan untuk dapat mengidentifikasi dalam menilai kapabilitas pada sumber daya bahan peralatan yang

memiliki keterkaitan dengan manusia dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan program.

- 3) Process, pada bagian ini merupakan evaluasi proses dengan memiliki tujuan untuk dapat mengidentifikasi serta memprediksi permasalahan untuk hambatan pada pelaksanaan program.
- 4) Product, pada bagian ini merupakan evaluasi produk yang memiliki tujuan untuk dapat mengukur bagaimana cara menginterpretasikan didalam memutuskan perolehan hasil yang telah dicapai pada program. Dengan demikian apakah sudah sesuai untuk memenuhi kebutuhan dari target yang sudah ditetapkan atau malah sebaliknya.

2.3 Kerangka Pikir

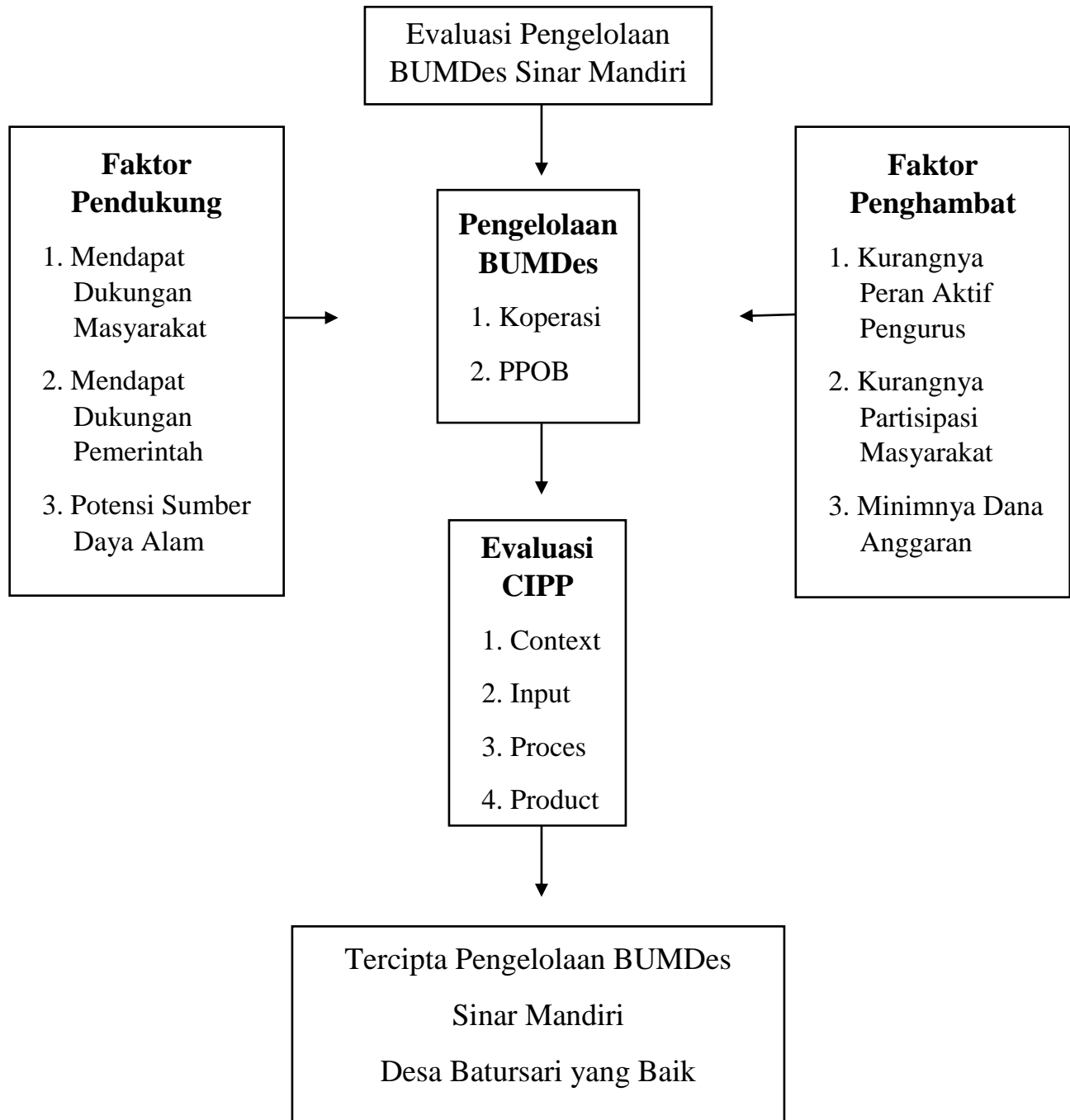
Pada bagian proses untuk pengembangan suatu bentuk didalam dunia perekonomian ditingkat pedesaan sudah menjadi tugas lama yang dijalankan oleh pemerintah dalam berbagai macam bentuk program yang dikelola untuk kemajuan BUMDes. Dengan demikian dapat ditujukan untuk bentuk pendekatan alternatif yang baru dalam proses pembangunan perekonomian tingkat desa berdasarkan kebutuhan dan potensi yang dimiliki oleh desa.

Dalam hal ini dibutuhkan rancangan untuk pelaksanaan strategik untuk proses penjalanan BUMDes agar dapat memberikan pengembangan yang berhasil dalam penyesuaian target yang ditetapkan. Desa Batursari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak merupakan sebuah desa yang sudah mempunyai BUMDes dengan sebutan “SINAR MANDIRI”. BUMDes Sinar Mandiri ini sudah mulai diresmikan untuk dapat dikelola dan dikembangkan pada musyawarah desa di tanggal 28 Oktober 2022 dan sesuai dengan apa yang termuat didalam Peraturan Desa No.01 tentang pembentukan BUMDes agar dapat dikelola yang kurang lebih dalam beberapa bulan terakhir dalam proses pengembangannya.

Didalam sebuah pengelolaan diharapkan BUMDes harus mampu untuk memberikan pengelolaan yang baik dan benar dalam mengembangkan prinsip yang digunakan untuk mengedepankan kemajuan BUMDes diantaranya Partisipatif, Kooperatif, Emansipatif, Transparansi, Sustainabel dan Akuntabel. Dari beberapa prinsip tersebut diharapkan dapat memberikan proses pengembangan yang lebih baik untuk dapat menyusun proses pengembangan BUMDes Sinar Mandiri. Dengan demikian BUMDes yang berstatus pemula ini harus masih banyak untuk melakukan proses pengembangan tahapan evaluasi yang dijalankan agar sesuai dengan tujuan target yang akan dikembangkan oleh pihak pengelola BUMDes Sinar Mandiri Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.

Pada bahasan penelitian ini akan dilakukan suatu bentuk kajian yang memberikan bentuk proses tahapan pengelolaan BUMDes Sinar Mandiri dengan menggunakan bentuk evaluasi CIPP (Context, Input, Process, dan Product) sesuai dengan apa yang sering dikenal dengan sebutan Evaluasi Formatif (Endang Mulyaningsih,2011). Sebagaimana dengan apa yang dijelaskan pada bagian kerangka pikir berikut ini:

Gambar 2.1
Bagian Kerangka Pikir :



2.4 Fokus Penelitian

Sesuai dengan apa yang ada pada fokus penelitian yang diangkat dari bentuk kerangka pikir diatas, maka bentuk fokus pada penelitian ini yaitu:

1. Evaluasi pengelolaan BUMDes Sinar Mandiri di Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak,
2. Faktor pendukung dan faktor penghambat apa saja yang ada dalam evaluasi pengelolaan BUMDes Sinar Mandiri di Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.

2.5 Deskripsi Fokus Penelitian

Pada penelitian berikut ini menggunakan bagian deskripsi fokus yang akan diterapkan didalam fokus ini yaitu:

1. Evaluasi Pengelolaan BUMDes Sinar Mandiri

Didalam bentuk evaluasi yang dimaksud merupakan pengelolaan yang mengukur suatu usaha sejauh mana proses pengelolaan yang akan dilakukan agar dapat sesuai dengan target dan tujuan yang ditetapkan. Dalam bentuk program pada penelitian ini merupakan pembentukan tujuan untuk tahapan evaluasi pengelolaan BUMDes Sinar Mandiri Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. Pada pengelolaan ini Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang mana merupakan bentuk kesesuaian dengan penjelasan Permendes didalam pasal 12 No.4 tahun 2015. Berdasarkan ditetapkannya PERDes No.01 tahun 2014 maka pihak pengelola akan menyesuaikan dengan membentuk BUMDes Sinar Mandiri yang akan dikelola oleh Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa Batusari.

2. Model Evaluasi CIPP

Didalam model yang akan digunakan untuk bahan penelitian ini menggunakan model evaluasi CIPP yang mana merupakan singkatan Context, Input, Process dan Produk. Pada evaluasi ini sendiri memiliki berbagai macam komponen yang meliputi sebagai berikut:

- a. Context, yaitu merupakan bentuk orientasi utama dari sebuah evaluasi konteks untuk dapat digunakan mengidentifikasi pada bagian latar belakang yang bila akan diperlukan untuk memberikan suatu bentuk tindakan perubahan dan munculnya banyak program dari subjek yang terlibat pada pengambilan keputusan.
- b. Input, yaitu merupakan tahapan yang dilakukan untuk mengidentifikasi dan menilai seberapa jumlah kapabilitas untuk sumber daya bahan, alat, manusia dan biaya, dan dapat memberikan sebuah pelaksanaan program yang terpilih.
- c. Process, yaitu merupakan bagian sebuah tahapan yang digunakan sebagai mengidentifikasi pada prediksi yang akan memberikan dampak hambatan pada sebuah pelaksanaan program.
- d. Product, yaitu merupakan bagian untuk mengukur hasil dari yang telah dicapai untuk pengembangan program dan telah sesuai dengan kebutuhan target yang diharapkan atau belum.

3. Faktor Pendukung

Didalam faktor pendukung ini bertujuan untuk memberikan bagian kerangka pikir yang sesuai dengan tujuan dari penelitian yaitu mengetahui apa saja faktor yang mendukung dalam pengelolaan BUMDes Sinar Mandiri.

4. Faktor Penghambat

Didalam faktor penghambat ini bertujuan untuk mengetahui apa saja yang menjadi hambatan dalam proses pengelolaan agar dapat memberikan masukan untuk kemajuan BUMDes Sinar Mandiri.

5. Desa Batusari merupakan sebuah desa terbesar yang berada di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dan mulai mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang diberi nama BUMDes Sinar Mandiri.